

Judul : Demi kelancaran arus mudik, komisi V desak percepatan perbaikan infrastruktur jalan
Tanggal : Minggu, 22 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Demi Kelancaran Arus Mudik **Komisi V Desak Percepatan Perbaikan Infrastruktur Jalan**

Senayan mendorong percepatan perbaikan infrastruktur di Jawa Tengah (Jateng) menjelang arus mudik Lebaran. Langkah ini diperlukan agar mobilitas masyarakat bisa berjalan lancar, aman dan nyaman.

ANGGOTA Komisi V DPR Sudjatmiko menilai, sejumlah titik di jalur Pantai Selatan (Pansela) Jateng masih memerlukan penanganan serius. Apalagi, kondisi jalan di tingkat kabupaten masih membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat (Pempus) agar perbaikan dapat berjalan optimal.

"Untuk jalan tol dan jalur Pantura relatif siap, tapi jalan kabupaten Pansela masih membutuhkan dukungan. Terutama untuk memperlancar arus mudik," ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Sudjatmiko menegaskan, penanganan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan Pempus dan Pemerintah Daerah (Pemda). Prioritas penanganan perlu difokuskan pada wilayah yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.

"Anggaran harus difokuskan pada sektor yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat dan menunjang mobilitas," saran dia.

Selain itu, masih ada persoalan lain yang berpotensi

mengganggu kelancaran mudik, seperti banjir, pertintasan kereta api tanpa palang pintu, hingga minimnya penerangan jalan. Persoalan tersebut harus segera ditangani secara terintegrasi karena saling berkaitan.

Dia juga menyoroti persoalan banjir dan kerusakan jalan yang kerap terjadi di Jateng. Masalah tersebut tidak bisa dilihat secara sederhana karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi lingkungan dan aktivitas manusia.

Kondisi lingkungan ini karena banjir yang dipicu oleh kombinasi curah hujan tinggi, penurunan muka tanah, hingga fenomena rob akibat kenaikan air laut.

Sedangkan aktivitas manusia disebabkan oleh kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL). "Ke depan, kebijakan zero ODOL diharapkan bisa mengurangi kerusakan jalan," kata politikus PKB ini.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan tol dan pengendalian kendaraan ODOL menjelang arus mudik Lebaran. Upaya tersebut dilakukan guna



Sudjatmiko

memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan.

"Kondisi jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), terutama terkait kualitas permukaan jalan," ujar Lasarus dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Bagi Lasarus, ini penting diperhatikan karena masih ditemukannya kecelakaan yang diduga dipicu oleh kondisi jalan yang tidak memenuhi standar. Karena itu, kemulusan permukaan jalan tol merupakan bagian dari standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh badan usaha jalan tol.

"Ini menyangkut keselamatan pengguna jalan yang sudah membayar layanan," tandas politikus PDIP ini.

Komisi V DPR telah memben-

tuk panitia kerja (panja) yang bertugas mengawasi komitmen Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Panja ini akan memastikan seluruh ruas jalan tol dalam kondisi baik dan mulus sebelum periode mudik lebaran dimulai.

"Jika terjadi kerusakan, perbaikannya harus dilakukan dengan cepat," tegasnya.

Selain itu, dia menyoroti persoalan kendaraan ODOL yang menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan jalan dan kecelakaan. Maka dari itu, Pemerintah bersama Komisi V DPR menargetkan kebijakan zero ODOL dapat diterapkan secara penuh pada Januari 2027.

Sebagai langkah penguatan, kata dia, Komisi V DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Revisi tersebut akan memuat sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari sanksi administratif hingga pidana.

"Nantinya sanksi tidak hanya untuk sopir, tetapi juga pemilik kendaraan dan pemilik barang. Semua pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi," tegas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) ini.

Lebih lanjut, dia memuji kondisi infrastruktur jalan di Jateng yang dinilai cukup baik. Tingkat kemandapan jalan men-

capai sekitar 94 persen, termasuk yang tertinggal di Indonesia.

"Kami mendorong agar kualitas tersebut terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen demi mendukung kelancaran arus mudik dan aktivitas masyarakat," kata dia.

Sementara, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, total panjang jalan provinsi di wilayahnya mencapai sekitar 2.362 kilometer. Berdasarkan pendataan terbaru, terdapat sekitar 4.870 titik lubang yang menjadi prioritas penanganan.

"Target kami menjelang arus mudik dan balik, lubang-lubang tersebut sudah tertutup, dan jalan dalam kondisi mantap. Ini menjadi komitmen kami demi keselamatan pengguna jalan," kata Luthfi, dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Luthfi menyatakan, perbaikan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut keselamatan berlalu lintas. Juga mendukung pergerakan ekonomi, karena konektivitas jalan memperlancar distribusi barang dan jasa.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) terbuka terhadap masukan berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan Jateng.

"Apa pun yang kami lakukan ini untuk masyarakat Jateng," tutupnya. ■ TIF